



Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Sumbawa Besar

M Sifri Hamsah¹, Ahmad Jibrail²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: ahmad.jibrail@uts.ac.id

Diterima: 16-01-2026 | Disetujui: 26-01-2026 | Diterbitkan: 28-01-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of social responsibility accounting at the Regional Water Utility Company (PDAM) in Sumbawa Besar (Perumdam Batulanter). As a Regional Government-Owned Enterprise (BUMD), PDAM plays a strategic role in providing public services that are not only profit-oriented but also focused on social welfare and environmental sustainability. The research method employed is a qualitative approach with a post-positivism paradigm. Primary data were collected through in-depth interviews with the financial manager, technical staff, and the community as service users, supported by documentation techniques. Data validity was ensured through source and technical triangulation. The results of the study indicate that PDAM Sumbawa Besar has implemented social responsibility accounting across several key dimensions. Responsibility to the government is demonstrated through transparent financial and non-financial performance reporting. For employees, the company ensures welfare rights, occupational safety through BPJS, and involvement in decision-making processes. Social information disclosure has also been optimized via digital platforms. However, the study finds that responsibilities toward the community and the environment have not been maximized. There remains a gap between public expectations and the reality of service delivery, particularly regarding interrupted water flow, occasional water turbidity, and slow responses to pipe leaks that lead to resource wastage. Overall, while PDAM has integrated social responsibility accounting into its operations, improvements in infrastructure efficiency and environmental communication are necessary to enhance accountability and maintain the trust of all stakeholders.

Keywords Social Responsibility Accounting; PDAM Sumbawa Besar; Public Service; Transparency; Agency Theory.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sumbawa Besar (Perumdam Batulanter). Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan publik yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivisme. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan, staf teknis, dan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta didukung oleh teknik dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Sumbawa Besar telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada beberapa dimensi utama. Tanggung jawab kepada pemerintah diwujudkan melalui pelaporan kinerja keuangan dan non-keuangan yang transparan. Terhadap pegawai, perusahaan telah menjamin hak kesejahteraan, keselamatan kerja melalui BPJS, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi sosial juga telah dioptimalkan melalui

platform digital. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan belum berjalan maksimal. Terdapat kesenjangan antara harapan publik dengan realitas layanan, terutama terkait kontinuitas aliran air yang sering terganggu, kualitas air yang terkadang keruh, serta lambatnya penanganan kebocoran pipa yang berdampak pada pemborosan sumber daya. Secara keseluruhan, PDAM telah mengintegrasikan akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam operasionalnya, namun diperlukan peningkatan efisiensi infrastruktur dan komunikasi lingkungan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Katakunci: Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial; PDAM Sumbawa Besar; Pelayanan Publik; Transparansi; Teori Keagenan.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Hamsah, M. S., & Jibrail, A. (2026). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Sumbawa Besar. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 2615-2629.
<https://doi.org/10.63822/9r8k4q16>

PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sumbawa Besar, dikenal sebagai Perumdam Batulan teh Kabupaten Sumbawa, merupakan badan usaha milik daerah yang bertugas menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, karena digunakan untuk konsumsi, mandi, memasak, mencuci, serta aktivitas sosial dan ekonomi lainnya. Dalam konteks wilayah Kabupaten Sumbawa, ketersediaan air yang dapat diolah dan didistribusikan merupakan tantangan tersendiri, mengingat karakteristik geografis daerah yang termasuk area dengan keterbatasan sumber air yang optimal. Perumdam Batulan teh kemudian dibentuk untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan cara mengolah sumber air baku menjadi air bersih yang layak didistribusikan kepada konsumen, terutama di pusat kota Sumbawa Besar dan daerah-daerah sekitarnya, serta mengelola sistem jaringan distribusi supaya air sampai ke pelanggan secara merata. (purnama et al, 2025).

Dalam praktiknya, PDAM Batulan teh berperan sebagai lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap aspek teknis pendistribusian air, tetapi juga terhadap kepuasan pelanggan dan keberlanjutan operasional. Banyak penelitian menyatakan bahwa meskipun PDAM telah dibangun dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat, sistem distribusi sering menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan antara kapasitas produksi dan kebutuhan aktual penduduk, tekanan air yang tidak stabil di jaringan perpipaan, serta tantangan dalam meningkatkan cakupan layanan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa. (purnama et al, 2025).

PDAM Sumbawa Besar juga menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air, kualitas air, dan aksesibilitas layanan. Misalnya, berdasarkan laporan dari media lokal (Kompas.com, 2024) seringkali terjadi keluhan dari pelanggan mengenai kualitas air yang kurang baik atau gangguan pasokan air akibat kerusakan infrastruktur.

Dalam konteks BUMD, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), efektivitas sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi sangat penting. PDAM berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang dituntut untuk menjaga efisiensi keuangan dan kinerja layanan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak PDAM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengendalian biaya operasional dan efisiensi manajerial, yang berdampak pada rendahnya kinerja keuangan dan pelayanan publik. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem akuntansi yang tidak sekadar berfungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi alat penilaian kinerja dan dasar pengambilan keputusan manajerial yang objektif. Dalam peraturan pemerintah No. 57 didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan kesejahteraan masyarakat tercapai. Salah satu dari BUMD tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Tugas pokok yang dimiliki ialah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, pelayanan umum dan memupuk pendapatan.

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak (Menkes, 2002). Sumber air bersih digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu

air hujan, air permukaan, air tanah dan mata air. Persyaratan kualitas air bersih memiliki terdiri dari syarat fisik, kimia dan biologi (Menkes, 2017).

Salah satu perusahaan yang erat kaitannya dengan masyarakat dan senantiasa bertanggung jawab atas biaya operasionalnya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM merupakan perusahaan persero yang masih dikendalikan oleh pemerintah. Di Indonesia, PDAM merupakan perusahaan yang dikelola oleh tiap pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk memproduksi dan mendistribusikan air bersih. Peran utama dari pemerintah dalam memasok air bersih salah satunya adalah mengolah air yang dari sumber air baku kemudian diolah menjadi air yang aman untuk dikonsumsi lalu disalurkan kepada tiap masyarakat pada daerahnya masing-masing (Suaramerdeka.com, 2021).

Adapun contoh yang terjadi di wilayah Sumbawa Besar yaitu kelangkaan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa sangat parah, bagaimana tidak, kelangkaan air bersih ternyata bukan hanya terjadi di musim kemarau tetapi terjadi pada bulan 8 – 12, di mana intensitas hujan turun cukup tinggi. Hal ini dirasakan oleh Masyarakat di Komplek Unter Katimis. Mereka di musim hujan lebih langka mendapatkan air, sehingga masyarakat unter katimis membeli air Tanki

Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data ekonomi suatu entitas guna menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (Alfonsius, 2021). Akuntansi juga dapat dipahami sebagai proses pengolahan informasi keuangan yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan akurat.

Prinsip utama dalam akuntansi meliputi transparansi, yaitu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan; serta keberlanjutan, yakni berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. (Sisdianto, 2024). Akuntabel merupakan proses mengevaluasi kegiatan yang dapat dipertanggungjawaban (Suleman et al., 2020). Akuntansi pertanggungjawaban mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan apakah manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengatur pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya atau yang berada di bawahnya, dan mengevaluasi hasil kerja pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan diwaktu yang akan datang.

Menurut Mulyadi, (2020) menjelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam pengendalian biaya administrasi dan umum melalui 5 aspek utama, yaitu: pengendalian biaya, akuntabilitas manajerial, evaluasi kinerja, efisiensi operasional, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Sistem ini merupakan sesuatu yang diterapkan perusahaan untuk mendistribusikan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar setiap manajer mampu mengelola anggaran serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil kinerja yang dicapai (Bawang et al., 2023).

Akuntansi pertanggungjawaban memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengendalikan aktivitas organisasi, informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawaban terhadap perencanaan dan realisasinya. Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk mengukur berbagai pencapaian setiap pusat pertanggungjawaban dengan menggunakan data informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dalam mengoperasikan pusat

pertanggungjawaban (Hansen & Mowen, 2013).

Dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, maka akan diperoleh informasi akuntansi masa lalu yang berperan sebagai pengukur kinerja di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan yang digunakan organisasi untuk mencatat, mengukur, dan mengungkapkan dampak sosial serta lingkungan yang timbul dari aktivitasnya, sehingga akuntabilitas perusahaan tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusi dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini membantu perusahaan menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan program sosial, pengelolaan lingkungan, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab (Saputri & Sisdianto, 2024).

Akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat sebagai alat pengendalian manajemen yang membantu organisasi dalam menilai kinerja setiap pusat pertanggungjawaban, baik pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, maupun pusat investasi. Melalui sistem ini, manajemen dapat mengetahui sejauh mana realisasi kinerja telah sesuai dengan anggaran dan target yang ditetapkan, sehingga penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. (Hansen & Mowen, 2018) indikator yang digunakan yaitu Lingkungan: Contohnya Pengurangan Tingkat Kehilangan Air". Tingkat kehilangan air, mengacu pada volume air yang diproduksi dan didistribusikan oleh PDAM, namun tidak sampai ke pelanggan atau tidak menghasilkan pendapatan. Kehilangan air ini dapat disebabkan oleh kebocoran pipa, pencurian air, kesalahan pengukuran, atau masalah administrasi lainnya.

Dengan memfokuskan penelitian pada indikator ini, untuk itu peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana PDAM di Sumbawa Besar mengelola sumber daya air, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kehilangan air, dan mengevaluasi efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menguranginya. Solusi dari permasalahan ini melakukan kegiatan pelestarian alam seperti reboisasi, penghijauan, atau reklamasi lahan pasca-operasi. Secara keseluruhan, analisis pertanggungjawaban sosial dan lingkungan bertujuan untuk menilai sejauh mana operasional perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan yang terbaik, tepat dan terukur untuk meningkatkan kualitas kinerja PDAM dalam pengelolaan air bersih, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Sumbawa Besar..

Analisa pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan mencerminkan sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap karyawan, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PDAM menjadi semakin penting dalam era globalisasi dan kesadaran akan keberlanjutan. Melalui akuntansi ini, PDAM dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif. Sumbawa Besar, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga memiliki PDAM yang berperan dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat setempat. Namun, seperti halnya PDAM di daerah lain,

Pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PDAM tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban regulasi atau tuntutan masyarakat tetapi akuntansi pertanggungjawaban sosial (APS)

memainkan peran krusial dalam masyarakat modern, berfungsi sebagai fondasi bagi dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan transparan. Berdasarkan (PPID Sumbawa, 2012), PDAM yang secara aktif melaporkan kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon di daerah resapan air (sesuai dengan program pemerintah daerah yang tertata didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa, 2021) atau program edukasi masyarakat mengenai penggunaan air bersih.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Tiara Dwiana yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PDAM Tirta Musi Palembang", (2014) bertujuan untuk menemukan bahwa PDAM Tirta Musi Palembang telah menerapkan beberapa aspek akuntansi pertanggungjawaban sosial, seperti pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Namun, pengukuran dan evaluasi kinerja sosial dan lingkungan masih belum optimal.

Penelitian lain yang di lakukan oleh Nadia Anggraini Ritonga yang berjudul "Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial terhadap Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan PDAM di Jawa Timur", (2021) bertujuan untuk menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan PDAM di Jawa Timur. PDAM yang lebih aktif dalam melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Oleh itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PDAM Sumbawa Besar. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana PDAM mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan kinerja sosial dan lingkungannya, serta bagaimana akuntansi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pertanggungjawaban sosial di sektor publik, khususnya pada PDAM, serta memberikan rekomendasi bagi PDAM Sumbawa Besar dalam meningkatkan kinerja sosial dan lingkungannya. Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melalukan penelitian dengan judukl skripsi "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Sumbawa Besar".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekankan makna dari generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami berbagai aspek secara mendalam dan menyeluruh melalui penjelasan-penjelasan teoritis yang berhubungan dengan analisis penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PDAM. Data kualitatif yang diperoleh berupa informasi dari hasil wawancara serta dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti (Muljadi dan Goestaman, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini mengandalkan data primer sebagai pondasi utama. Menurut Amboro et al. (2022), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui instrumen yang telah ditetapkan, dengan tingkat validitas dan relevansi yang tinggi karena proses

pengumpulannya dilakukan secara langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penelitian. Dalam konteks ini, data primer dikumpulkan dari para informan kunci melalui interaksi personal yang dilakukan secara mendalam. Data dikumpulkan dalam bentuk catatan hasil wawancara yang kaya akan informasi serta dokumentasi yang memuat bukti fisik maupun dokumen yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali berbagai aspek secara komprehensif tanpa memerlukan teknik pengumpulan data tambahan yang tidak relevan.

Objek penelitian ini difokuskan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Batulan teh Kabupaten Sumbawa. Pemilihan objek ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk meneliti proses penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial baik pada lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan masih terdapat kekurangan data atau peneliti tidak dapat melakukan penelitian langsung karena kendala, maka peneliti akan menggunakan fasilitas telepon sebagai alternatif untuk menggali informasi atau melakukan wawancara guna melengkapi data yang dirasa kurang, setelah sebelumnya diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai penelitian yang dilakukan kepada para informan.

Penelitian ini melibatkan berbagai informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Heryana (2018), informan dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga kategori: informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Yunan sebagai bagian Teknik dan Bapak Fikry Hasdah sebagai Pegawai PDAM, yang dipilih karena memiliki peran penting dalam penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di perusahaan. Informan utama adalah Bapak Indra Alamsyah sebagai Manajer Umum dan Keuangan yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Sedangkan informan pendukung adalah masyarakat yang menjadi penerima dampak dari penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial perusahaan. Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di PDAM.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam yang menggunakan teknik percakapan terbuka dan tidak terstruktur secara ketat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggali informasi secara terbuka dari para informan. Kedua, dokumentasi yang meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis maupun visual seperti arsip, laporan kegiatan, catatan organisasi, foto, rekaman, atau dokumen lain yang relevan dengan fenomena penelitian. Dokumentasi diperoleh dari pencatatan, arsip, dan segala bentuk dokumen yang berhubungan dengan PDAM. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan komprehensif mengenai penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di PDAM Sumbawa Besar, sesuai dengan prinsip triangulasi data dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2021).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menerapkan teknik triangulasi. Moleong (2021) mengidentifikasi dua bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk membandingkan hasil temuan, kemudian dilakukan pengecekan untuk memperkuat keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapat dari tiga sumber yang berbeda, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap tiga orang yang memiliki peran berbeda di PDAM.

Teknik ini berfungsi untuk memperkaya informasi sehingga data yang didapatkan dapat dipercaya. Keabsahan data menjadi aspek fundamental karena penelitian kualitatif mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama, sehingga diperlukan serangkaian teknik untuk menjamin bahwa data memiliki tingkat kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian yang memadai.

Teknik analisis data mengacu pada model yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019) yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data (Data Collection) yang menjadi aktivitas utama dalam menggali informasi, data, dan hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tahap kedua adalah reduksi data (Data Reduction) yang meliputi merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Tahap ketiga adalah penyajian data (Data Display) yang dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau flowchart. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, dengan memperhatikan hasil wawancara dan dokumentasi. Aktivitas analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data jenuh, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif mengenai penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di PDAM Sumbawa Besar (Unaradjan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tanggung Jawab PDAM terhadap Pemerintah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap pemerintah ini sudah dijalankan dengan baik. Beberapa informan sepakat bahwa pencatatan keuangan dan non keuangan perlu agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui secara jelas bentuk bantuan yang di berikan maupun di terima dalam pelaksanaan Tanggung jawab kepada Pemerintah Bapak Indra Alamsyah menyatakan:

“Sebagai BUMD, kami berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan seluruh kinerja operasional dan keuangan kami kepada pemerintah daerah. Selain laporan keuangan, kami juga menyajikan informasi non-keuangan seperti program pelayanan dan upaya lingkungan, agar semua pihak, termasuk pemerintah, bisa menilai kinerja kami secara menyeluruh.”

Sementara itu, Bapak Yunan menambahkan *“Pelaporan kami tidak hanya fokus pada angka, tapi juga bagaimana pelayanan air bersih diberikan kepada masyarakat, termasuk dampak sosial dan lingkungan dari operasional kami. Dengan begitu, integrasi pelaporan non-keuangan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sesuai yang disarankan oleh literatur sektor publik.”*

Berdasarkan pernyataan para informan, tanggung jawab PDAM terhadap pemerintah daerah dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Penyajian laporan keuangan maupun non-keuangan secara transparan dan akuntabel menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap kinerja operasional dan sosial PDAM.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pegawai

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap pegawai ini sudah dijalankan dengan baik. Beberapa informan sepakat bahwa tanggung jawab PDAM terhadap pegawai itu di lakukan secara baik dari sisi kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Bapak Indra Alamsyah menyatakan

“Kami selalu memastikan pegawai mendapatkan hak-haknya secara adil, mulai dari upah, tunjangan, hingga fasilitas kesehatan. Selain itu, kami menekankan keselamatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, baik bagi pegawai administrasi maupun lapangan.”

Sementara itu, Bapak Yunan menambahkan *“Dari perspektif pegawai, perusahaan sudah cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pegawai merasakan manfaat dari fasilitas kerja yang memadai, lingkungan kerja yang aman, dan kesempatan yang setara. Kami juga melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan yang terkait pekerjaan mereka, sehingga tercipta hubungan kerja yang transparan dan profesional.”*

Berdasarkan informasi dari para informan, tanggung jawab PDAM terhadap pegawai dapat dikatakan sudah berjalan maksimal, baik dari sisi kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerja sekaligus mendukung kinerja operasional secara berkelanjutan.

3. Pengungkapan Dan Kualitas Pelaporan Sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial ini sudah dijalankan dengan baik. Karena PDAM telah melakukan langkah-langkah konkret melalui informasi digital untuk memastikan pengungkapan dan pelaporan sosial berjalan optimal. Bapak Indra Alamsyah menjelaskan

“Kami berupaya menyajikan informasi terkait seluruh kegiatan operasional, program kerja, dan dampak sosial serta lingkungan secara terbuka kepada masyarakat. Untuk mempermudah akses informasi, kami membuat akun resmi di website, Facebook, dan Instagram, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja sosial perusahaan dengan mudah dan transparan.”

Sementara itu, Bapak Yunan menambahkan *“Kualitas pelaporan sosial menjadi fokus utama kami. Kami memastikan informasi yang disampaikan relevan, lengkap, jelas, dan dapat dipercaya, agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja sosial PDAM secara akurat. Dengan langkah ini, kepercayaan publik terhadap perusahaan meningkat, dan pengelolaan tanggung jawab sosial bisa dikatakan sudah optimal.”*

Berdasarkan pernyataan para informan, pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial PDAM sudah berjalan maksimal, karena tidak hanya memberikan informasi yang transparan dan akurat, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses data melalui platform digital. Hal ini menunjukkan komitmen PDAM dalam mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja sosial perusahaan.

4. Tanggung jawab PDAM kepada Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat ini sudah dijalankan dengan baik. Beberapa informan sepakat bahwa PDAM telah menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui penyediaan layanan air bersih yang berkelanjutan

dan pengalokasian biaya operasional yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fikry Hasdah menyatakan

“Kami memastikan layanan air bersih tersedia secara andal dan sesuai standar kualitas untuk seluruh masyarakat. Jika ada gangguan atau keluhan, tim kami segera menindaklanjuti. Kami juga rutin melakukan sosialisasi tentang penggunaan air yang efisien dan ramah lingkungan.”

Bapak fikry menambahkan *“Keberhasilan layanan ini diukur dari kontinuitas pasokan, kualitas air, dan seberapa masyarakat merasakan manfaatnya. Kami berupaya menjaga harga tetap terjangkau dan pelayanan responsif agar masyarakat merasa puas dan terlindungi.”*

Dengan langkah-langkah tersebut, tanggung jawab PDAM terhadap masyarakat dapat dikatakan sudah maksimal, karena perusahaan tidak hanya menyediakan layanan yang andal, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan air secara bijak. Hal ini menunjukkan komitmen PDAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat yang mengatakan bahwa *“Penyediaan air bersih yang dinilai belum maksimal. Pengaduan tersebut mencakup aliran air yang tidak lancar, air sering tidak mengalir pada jam-jam tertentu, serta tekanan air yang rendah, khususnya di wilayah yang dataran tinggi atau jauh dari sumber distribusi. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kualitas air yang kurang baik, seperti air yang keruh, berbau, atau berubah warna pada waktu tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek kesehatan dan kebersihan, sehingga beberapa warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan biaya tambahan. Pengaduan lainnya berkaitan dengan respon dan penanganan gangguan oleh PDAM yang dinilai belum cepat dan merata. Informasi terkait gangguan distribusi air, pemeliharaan jaringan, atau perbaikan pipa sering kali tidak diterima secara jelas oleh pelanggan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PDAM.”*

Oleh karena itu tanggung jawab kepada masyarakat belum maksimal di karenakan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan PDAM dalam menyediakan air bersih yang berkelanjutan, merata, dan berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat berharap PDAM dapat meningkatkan kinerja operasional, perawatan infrastruktur, serta komunikasi pelayanan agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara lebih optimal.

5. Tanggung jawab terhadap Lingkungan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan ini sudah dijalankan dengan baik. Beberapa informan sepakat bahwa PDAM menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Bapak Indra Alamsyah menjelaskan

“Kami selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional. Pengelolaan sumber air dilakukan secara berkelanjutan, limbah diolah dengan aman, dan kami selalu berupaya mencegah pencemaran lingkungan. Semua langkah ini bertujuan agar operasional PDAM tidak merusak alam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Sementara itu, Bapak Yunan menambahkan *“Selain menjaga kualitas air dan lingkungan, kami*

juga melakukan program konservasi sumber daya alam untuk mendukung ekosistem sekitar. Kami berupaya menciptakan keseimbangan antara pelayanan air yang memadai bagi masyarakat dan perlindungan lingkungan, sehingga keberlanjutan menjadi prioritas utama perusahaan.”

Berdasarkan pernyataan para informan, tanggung jawab PDAM terhadap lingkungan dapat dikatakan sudah berjalan optimal, karena perusahaan tidak hanya menyediakan layanan air bersih, tetapi juga mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen PDAM dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan publik dan kelestarian alam.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat bahwa. *“Masyarakat juga mengeluhkan dampak operasional PDAM terhadap lingkungan sekitar, seperti kebocoran pipa yang dibiarkan dalam waktu lama sehingga menyebabkan genangan air, kerusakan jalan, serta pemborosan sumber daya air. Kebocoran tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.”*

“Masyarakat juga menilai kurangnya transparansi dan sosialisasi PDAM terkait program lingkungan, seperti perlindungan sumber mata air, penanaman pohon, atau edukasi penghematan air. Minimnya informasi ini menimbulkan persepsi bahwa kepedulian PDAM terhadap lingkungan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.”

Oleh karena itu tanggung jawab PDAM terhadap lingkungan belum dikatakan maksimal karena, pengaduan masyarakat menunjukkan adanya harapan agar PDAM lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, pengendalian dampak operasional, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Pembahasan Penelitian

1. Tanggung Jawab PDAM terhadap Pemerintah

Tanggung jawab PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Tanggung jawab ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta penyetoran kontribusi atau dividen kepada pemerintah daerah. Selain itu, Tanggung jawab PDAM terhadap pemerintah dalam bentuk non keuangan juga menjadi kewajiban PDAM untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah, dalam bentuk melayani masyarakat dalam memberikan air bersih dan memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan program pemerintah di bidang pelayanan air bersih, penyampaian laporan kinerja operasional secara transparan, serta pengelolaan aset daerah secara bertanggung jawab. Selain itu, PDAM juga berkewajiban menjaga kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, dan berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Berdasarkan hasil informan di atas sejalan dengan teori agency dan mendukung bahwa PDAM menunjukkan upaya nyata dalam menjalankan perannya sebagai agent yang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tanggung jawab PDAM terhadap pemerintah daerah melalui

kepatuhan terhadap regulasi serta penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan secara transparan dan akuntabel. Dalam Agency Theory, pelaporan ini berfungsi sebagai alat monitoring bagi principal untuk menilai kinerja agent dan memastikan bahwa tindakan PDAM selaras dengan kepentingan pemerintah daerah.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pegawai

Tanggung jawab PDAM terhadap pegawai merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperlakukan seluruh tenaga kerja secara adil, manusiawi, dan profesional dalam setiap aspek hubungan kerja. Kewajiban ini mencakup pemenuhan hak-hak pegawai, peningkatan kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bentuk BPJS, pengembangan kompetensi, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif. Dalam konteks akuntansi pertanggungjawaban sosial, tanggung jawab kepada pegawai juga mencakup komitmen perusahaan untuk transparan dalam kebijakan ketenagakerjaan, memberikan upah dan tunjangan yang layak, menjamin kesempatan yang setara tanpa diskriminasi, serta melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Berdasarkan hasil informan di atas sejalan dengan teori agency dan mendukung bahwa temuan penelitian ini mendukung teori agency. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara praktik yang dijalankan PDAM dengan prinsip utama teori agency, yaitu upaya manajemen (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pegawai sebagai prinsip internal. Teori agency menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul apabila agen tidak menjalankan kewajibannya secara adil dan transparan. Namun, dalam kasus PDAM, manajemen telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak pegawai melalui pemberian upah dan tunjangan yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bentuk BPJS ketenaga kerjaan, penyediaan fasilitas kerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik agency dan meningkatkan kepercayaan antara agen dan prinsipal.

Pernyataan Bapak Indra Alamsyah dan Bapak Yunan menguatkan bahwa tanggung jawab terhadap pegawai telah dirasakan secara nyata dan dijalankan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen PDAM tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan pegawai. Dengan demikian, hubungan antara agen dan prinsipal berjalan secara selaras. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab PDAM terhadap pegawai mendukung teori agency, karena praktik yang dilakukan perusahaan mampu mengurangi potensi konflik kepentingan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

3. Pengungkapan Dan Kualitas Pelaporan Sosial

Pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan sosial mencakup penyajian informasi yang tertara di akun website, facebook, dan tentang kebijakan, program, serta dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, sementara kualitas pelaporan sosial menunjukkan sejauh mana informasi tersebut disajikan secara relevan, lengkap, jelas, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pengungkapan yang memadai dan kualitas pelaporan sosial yang baik dapat meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sosial perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan teori agency dan mendukung karena praktik pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial yang dilakukan PDAM menunjukkan adanya hubungan pertanggungjawaban antara agent dan principal. Dalam teori agency, principal (masyarakat dan pemerintah daerah) memberikan mandat kepada agent (PDAM) untuk mengelola pelayanan air bersih serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Namun, dalam hubungan ini terdapat risiko asimetri informasi, yaitu kondisi ketika agent memiliki informasi lebih banyak dibandingkan principal.

Pengungkapan dan pelaporan sosial yang transparan, lengkap, dan dapat dipercaya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Dengan menyampaikan informasi mengenai program sosial, kebijakan lingkungan, serta dampak operasional secara terbuka, PDAM menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan kepentingan principal. Hal ini membantu principal dalam menilai kinerja agent secara objektif.

Selain itu, kualitas pelaporan sosial yang baik juga mencerminkan komitmen PDAM untuk tidak hanya berorientasi pada aspek operasional dan keuangan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, praktik tersebut memperkuat kepercayaan antara principal dan agent serta meminimalkan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial PDAM secara jelas mendukung penerapan teori agency, karena menjadi sarana pertanggungjawaban dan transparansi dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

4. Tanggung jawab PDAM kepada Masyarakat

Tanggung jawab PDAM kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana perusahaan berkewajiban menyediakan air bersih yang aman, andal, dan terjangkau. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan air sesuai standar kualitas, menjaga kontinuitas pasokan, menanggapi keluhan atau gangguan layanan dengan cepat, serta melakukan edukasi terkait penggunaan air yang efisien dan ramah lingkungan

Hal tersebut sejalan dengan teori agency dan mendukung karena menunjukkan bahwa PDAM sebagai agent yang telah menjalankan perannya sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai principal. Responsivitas terhadap keluhan, kontinuitas pasokan, serta edukasi kepada masyarakat merupakan bentuk upaya PDAM dalam meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori agency. Dengan demikian, tanggung jawab PDAM kepada masyarakat mencerminkan penerapan prinsip teori agency, di mana perusahaan tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga mempertanggungjawabkan kinerjanya secara nyata demi kepentingan publik.

5. Tanggung jawab PDAM Terhadap Lingkungan

Tanggung jawab PDAM kepada lingkungan merupakan kewajiban perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Kewajiban ini mencakup pengelolaan sumber air secara berkelanjutan, pencegahan pencemaran air dan lingkungan, pengelolaan limbah yang aman, serta upaya konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, PDAM harus memastikan bahwa kegiatan penyediaan air tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat

dan perlindungan alam.

Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan tersebut sejalan dengan teori agency, yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai principal dengan manajemen PDAM sebagai agen. Dalam hubungan ini, manajemen PDAM memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai kepentingan principal, termasuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset publik yang bernilai strategis. Pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab merupakan bentuk akuntabilitas agen dalam mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan principal. Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan PDAM tidak hanya bersifat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan peran agen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PDAM telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan cukup baik. Tanggung jawab kepada pemerintah ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan yang transparan. Tanggung jawab kepada pegawai tercermin dari pemenuhan hak, kesejahteraan, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan profesional. PDAM juga menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan menyediakan layanan air bersih yang layak, merespons keluhan pelanggan, serta melakukan edukasi penggunaan air secara bijak. Dalam aspek lingkungan, PDAM berupaya menjaga kelestarian sumber air dan mencegah pencemaran melalui pengelolaan operasional yang berkelanjutan. Selain itu, pengungkapan dan kualitas pelaporan sosial PDAM telah mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, PDAM telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sosial secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius, G. (2021). *Accounting information system and business organizations*, 1–11.
- Alfianto, M. A., Rossi, F. N., & Aulia, N. H. (2022). Media komunikasi pariwisata. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).
- Bawang, R. M. (2023). *Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya pada Pintar Asia Swalayan Maumere* [Skripsi, Universitas Nusa Nipa].
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2013). *Cost management: Accounting and control* (6th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Harahap, S. S. (2016). *Akuntansi sosial dan pertanggungjawaban sosial*. Bumi Aksara.
- Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. Universitas Esa Unggul.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Kementerian Kesehatan RI. (2002). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri*.

Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.*

Krisis air bersih di Sumbawa meluas, 34.555 jiwa terdampak. (2024, Oktober 29). [Kompas.com](https://www.kompas.com/). <https://www.kompas.com/>

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2020). *Akuntansi biaya* (Edisi 5). Salemba Empat.

Purnama, A., Ilfani, P. D., Satriawansyah, T., Rahman, A., & S, N. (2025). Analisis kelayakan sistem penyediaan air minum (SPAM) Semongkat terhadap daerah pelayanan (DAPEL) perumahan baiti jannati Sumbawa dalam tinjauan teknis. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 6(2), 97–102.

Pemerintah terus tingkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. (2021, Maret 22). [Suaramerdeka.com](https://www.suaramerdeka.com/). <https://www.suaramerdeka.com/>

Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2032*.

Saputri, I., & Sisdianto, E. (2024). Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan: Konsep, implementasi, dan tantangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 2(4).

Sisdianto, E. (2024). Analisis akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya (studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 2(4).

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Suleman, A. R., Dunggio, T., & Amran, T. (2020). Akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan sektor publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 45-57.